



Implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) at State Islamic Senior High School (MAN) 3 Balangan

Akhmad Berkatillah¹, Ni Made Musiyani Anjasmari¹, Arif Budiman¹, Sandi¹

¹Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

*Corresponding Author's e-mail: akhmadberkatillah21@gmail.com

Article History:

Received: November 5, 2025

Revised: November 28, 2025

Accepted: November 30, 2025

Keywords:

Indonesia Smart Program, Policy Implementation, MAN 3 Balangan, Educational Assistance

Abstract: *The Indonesia Smart Program (PIP), as regulated in Minister of Education and Culture Regulation No. 10 of 2020, is a strategic government policy designed to address various challenges in the education sector, including the lack of socialization to parents, mistargeting of aid recipients, a still-centralized determination process, and limited supporting human resources. This study aims to examine the implementation of PIP and the factors influencing it at MAN 3 Balangan, Lampihong District, Balangan Regency, employing a descriptive qualitative approach with a purposive sampling technique involving 12 informants. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and then analyzed through the stages of data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of PIP at MAN 3 Balangan has not been fully optimal, as indicated by weaknesses in actor interests, program benefits, determination structure, technical implementers, and inter-stakeholder coordination. Supporting factors include the availability of facilities, utilization of technology, well-organized administration, and adequate infrastructure, while inhibiting factors consist of limited information, restricted school authority, insufficient socialization, low participation, and uneven understanding among program managers. Therefore, it is recommended that the Ministry of Religious Affairs strengthen socialization, supervision, and coordination, while also encouraging active involvement of school principals, program managers, teachers, parents, and students to enhance the effectiveness of PIP implementation.*

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Berkatillah, A., Anjasmari, N. M. M., Budiman, A., & Sandi, S. (2025). Implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) at State Islamic Senior High School (MAN) 3 Balangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(11), 3314-3322. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4925>

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) tidak terlepas dari prinsip keadilan sosial dan pemerataan pendidikan. Dalam konteks kebijakan publik, program ini merupakan wujud konkret intervensi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan akibat faktor ekonomi. Keberhasilan program semacam ini sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi di tingkat daerah, karena pelaksana di lapangan berperan langsung dalam proses verifikasi data, penyaluran bantuan, serta pemantauan hasil. Oleh sebab itu, sinergi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan lembaga pendidikan penerima manfaat menjadi faktor kunci agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Selain itu, penting untuk meninjau pelaksanaan PIP melalui perspektif teori implementasi kebijakan publik. Menurut George C. Edwards III (dalam Anggara, 2018)¹,

keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks PIP, komunikasi berkaitan dengan sejauh mana informasi mengenai mekanisme dan kriteria penerima tersampaikan dengan jelas kepada sekolah dan peserta didik. Sumber daya mencakup kecukupan dana, sistem administrasi, serta kapasitas petugas pelaksana. Sementara disposisi pelaksana berkaitan dengan komitmen dan tanggung jawab pihak sekolah atau madrasah dalam menjalankan kebijakan, dan struktur birokrasi mencakup koordinasi antar lembaga terkait.

Dari perspektif Merilee S. Grindle (dalam Anggara, 2018)¹, efektivitas implementasi kebijakan seperti PIP juga dipengaruhi oleh content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (konteks implementasi). Isi kebijakan mencakup kejelasan sasaran, manfaat, serta mekanisme pelaksanaan bantuan, sedangkan konteks implementasi meliputi kondisi sosial ekonomi masyarakat, kapasitas pelaksana lokal, dan dukungan dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, implementasi PIP perlu mempertimbangkan kondisi daerah dan karakteristik peserta didik agar tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian terhadap implementasi Program Indonesia Pintar di MAN 3 Balangan menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana pelaksanaan program telah berjalan sesuai kebijakan yang berlaku, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilannya. Temuan penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak sekolah, pemerintah daerah, dan kementerian terkait untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan PIP di masa mendatang, sehingga tujuan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat benar-benar dapat diwujudkan.

LANDASAN TEORI

Berbagai teori implementasi dikembangkan oleh para ahli. Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kejelasan tujuan, sumber daya, dan komunikasi antar pelaksana (Subianto, 2020)¹¹. George Edward III menambahkan bahwa faktor komunikasi, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, dan sumber daya juga krusial dalam menunjang keberhasilan kebijakan (Anggara, 2018)¹. Sementara itu, Grindle dalam teorinya menyoroti pentingnya isi kebijakan serta konteks implementasi, termasuk kepentingan para aktor, manfaat program, dan kapasitas pelaksana (Anggara, 2018)¹. Model Goggin menekankan pada kejelasan pesan kebijakan, bentuk penyampaian, serta persepsi terhadap otoritas yang menyampaikan.

Pelaksanaan kebijakan publik sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat mendukung maupun menghambat. Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kejelasan ukuran kebijakan, sumber daya manusia dan material, hubungan antar lembaga pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial dan politik (Marwiyah, 2022)⁶. Dukungan teknologi, sistem administrasi yang terorganisir, dan fasilitas yang memadai merupakan beberapa aspek yang dapat memperkuat keberhasilan implementasi.

Namun demikian, hambatan juga kerap muncul dalam bentuk kurangnya informasi, keterbatasan wewenang pelaksana di tingkat sekolah, rendahnya partisipasi masyarakat, serta pemahaman pelaksana yang belum merata (Sunggono dalam Marwiyah, 2022)⁶.

Ketidaktepatan dalam pendistribusian manfaat juga menjadi masalah serius jika koordinasi dan transparansi tidak dijaga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di MAN 3 Balangan, Jalan Masjid Syuhada, Desa Sungai Awang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, dengan fokus pada implementasi Program Indonesia Pintar (PIP). Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan solusi perbaikan yang tepat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif naturalistik dengan karakter deskriptif, yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai makna tindakan sosial, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan dari sumber primer berupa wawancara mendalam dengan kepala sekolah, pengelola PIP, wali murid, serta peserta didik penerima, dan dari sumber sekunder berupa dokumen resmi, arsip, regulasi, serta literatur pendukung. Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling berdasarkan relevansi informasi yang dimiliki. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur, observasi langsung baik terbuka maupun tersamar, serta dokumentasi tertulis dan visual. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian naratif maupun visual, serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi secara berulang, sedangkan uji kredibilitas ditempuh dengan triangulasi, member check, dan dukungan dokumentasi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu bentuk intervensi kebijakan pemerintah berupa dukungan tunai yang ditujukan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, dengan tujuan utama menjamin keberlangsungan akses pendidikan serta mendukung implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun.

Isi Kebijakan

Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program

Apabila aturan strategis tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak (misalnya, jenis aturan strategis redistribution menurut kategori Ripley dan Lowie), pelaksanaannya akan lebih mudah karena tidak menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di MAN 3 Balangan belum berjalan optimal, khususnya dalam pemanfaatan dana oleh penerima manfaat. Meskipun inisiatif ini bersasaran membantu peserta didik kurang mampu dan telah dirasakan bermanfaat oleh sebagian peserta didik dan wali murid, kenyataannya masih terdapat penyimpangan penggunaan dana. Sebagian besar wali murid belum memahami mekanisme dan sasaran inisiatif secara utuh, sehingga dana dukungan sering digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk keperluan pendidikan. Kondisi ini berdampak pada terabaikannya kebutuhan belajar peserta didik, seperti perlengkapan sekolah dan transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan masih rendah dalam kelompok penerima manfaat. Secara umum, pelaksanaan PIP di MAN 3 Balangan tidak sesuai dengan teori pelaksanaan Merilee S. Grindle, terutama dalam aspek isi aturan strategis dan konteks pelaksanaan, karena kurangnya pemahaman, sosialisasi, dan pengawasan dalam pelaksanaan inisiatif.

Jenis manfaat yang akan di hasilkan

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan mudah dipelaksanaankan karena mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di MAN 3 Balangan memberikan sejumlah manfaat, namun pelaksanaannya belum merata dan belum sepenuhnya optimal. Program ini terbukti membantu peserta didik kurang mampu melalui dukungan biaya pendidikan yang digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah seperti baju, sepatu, tas, alat tulis, serta buku pelajaran. Selain manfaat materiil, inisiatif ini juga meringankan beban keuangan wali murid dan memberikan dampak psikologis positif bagi peserta didik, seperti rasa nyaman dan motivasi belajar yang meningkat. Namun demikian, terdapat berbagai kendala yang menghambat tercapainya manfaat secara menyeluruh. Beberapa peserta didik yang memenuhi syarat tidak menerima dukungan, penggunaan dana oleh sebagian penerima tidak sesuai peruntukannya, dan dukungan hanya diberikan kepada peserta didik kelas 11 dan 12, sementara peserta didik kelas 10 tidak mendapat kesempatan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat PIP belum dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh peserta didik yang membutuhkan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar di MAN 3 Balangan belum sesuai dengan teori pelaksanaan aturan strategis Merilee S. Grindle, khususnya dalam aspek isi aturan strategis dan konteks pelaksanaan. Program belum mampu menjamin keadilan dalam distribusi manfaat, serta masih menghadapi hambatan dalam pemahaman aturan strategis, ketepatan sasaran, dan pengawasan pelaksanaan.

Jangkauan perubahan yang di inginkan

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui aturan strategis tersebut, akan semakin sulit pula dilaksanakan. Misalnya, aturan strategis antikorupsi dan KKN yang telah berkali-kali dibuat oleh beberapa presiden RI dengan berbagai badan pemeriksa, tetapi menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia karena aturan strategis tersebut menuntut banyak perubahan perilaku yang tidak dilaksanakan dengan konsekuen. Berdasarkan hasil penelitian, jangkauan perubahan yang diinginkan dari pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di MAN 3 Balangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya telah menunjukkan hasil yang positif. Program ini memberikan dukungan nyata bagi peserta didik kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti perlengkapan sekolah berupa buku, alat tulis, tas, dan seragam. Dampaknya terlihat pada meningkatnya motivasi, konsentrasi, dan kepercayaan diri peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Mereka menjadi lebih aktif dan fokus karena tidak lagi terbebani oleh masalah biaya. Meski demikian, terdapat harapan yang mengemuka dari peserta didik dan wali murid agar inisiatif ini tidak hanya terbatas pada jenjang pendidikan menengah. Banyak yang menginginkan agar cakupan PIP diperluas hingga ke jenjang pendidikan tinggi melalui skema seperti PIP Kuliah. Harapan ini mencerminkan kebutuhan akan dukungan biaya pendidikan yang berkelanjutan, sehingga peserta didik dari keluarga kurang mampu dapat terus melanjutkan studi, meraih cita-cita, dan memberikan kontribusi positif bagi keluarga maupun masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, pelaksanaan Program Indonesia Pintar di MAN 3 Balangan telah mencerminkan kesesuaian dengan teori pelaksanaan aturan strategis Merilee S. Grindle dalam Sahya Anggara (2018: 255–257), terutama pada aspek isi aturan strategis yang relevan dengan kebutuhan sasaran, serta konteks pelaksanaan yang mendukung kelancaran inisiatif.

Kedudukan pengambilan keputusan

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam aturan strategis”baik secara geografis maupun organisatoris”, akan semakin sulit pula pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan proses penentuan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di MAN 3 Balangan berjalan masih menghadapi kendala. Proses proses penentuan dilakukan secara terpusat dan bersifat administratif, di mana sekolah mengusulkan peserta didik yang memiliki Kartu PIP melalui sistem UNIS, sementara keputusan akhir berada di tangan Kementerian Agama berdasarkan data kesejahteraan nasional (DTKS) dari Dinas Sosial. Orang tua peserta didik tidak dilibatkan secara langsung dalam proses ini dan hanya menerima informasi setelah keputusan ditetapkan. Selain itu, komunikasi antara sekolah dan wali murid masih terbatas, sehingga banyak wali murid tidak memahami prosedur dan alasan di balik penentuan penerima dukungan. Kurangnya sosialisasi serta minimnya keterlibatan wali murid dalam proses proses penentuan menyebabkan inisiatif terasa tertutup dan kurang transparan. Akibatnya, pelaksanaan inisiatif menjadi sulit untuk dipertanggungjawabkan secara partisipatif dan tidak mendorong dukungan penuh dari wali murid. Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan Program Indonesia Pintar di MAN 3 Balangan belum mencerminkan prinsip pelaksanaan aturan strategis menurut teori Merilee S. Grindle dalam Sahya Anggara (2018: 255–257), khususnya pada aspek isi aturan strategis dan konteks pelaksanaan yang seharusnya mempertimbangkan keterlibatan serta komunikasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk penerima manfaat.

Pelaksana program

Ketika pelaksana inisiatif memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh aturan strategis, tingkat keberhasilannya juga akan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di MAN 3 Balangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih berjalan masih menghadapi kendala, terutama dari aspek pelaksana inisiatif. Meskipun secara umum inisiatif ini mendapat dukungan yang cukup baik dari pemerintah, sekolah, guru, dan wali murid, serta lingkungan sekolah yang kondusif turut mendorong motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, namun di lapangan masih ditemukan sejumlah kendala teknis. Jumlah tenaga pelaksana yang terbatas tidak sebanding dengan beban kerja yang ada, sehingga menyebabkan proses administrasi menjadi lambat, pendataan peserta didik kurang teliti, serta kurangnya sosialisasi kepada wali murid dan peserta didik mengenai inisiatif ini. Selain itu, kemampuan teknis serta koordinasi antar pelaksana belum optimal, sehingga pelaksanaan inisiatif belum efisien dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh peserta didik yang berhak menerima dukungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun niat dan dukungan terhadap inisiatif cukup tinggi, efektivitas pelaksanaan masih terganggu oleh keterbatasan kapasitas pendukung manusia. Berdasarkan temuan tersebut, pelaksanaan PIP di MAN 3 Balangan belum sepenuhnya sesuai dengan teori pelaksanaan aturan strategis Merilee S. Grindle dalam Sahya Anggara (2018: 255–257), terutama dalam aspek isi aturan strategis dan konteks pelaksanaan yang menekankan pentingnya kesiapan pelaksana serta koordinasi yang kuat dalam mencapai sasaran aturan strategis secara maksimal.

Sumber daya yang disediakan

Tersedianya kapasitas pendukung yang dibutuhkan untuk mengpelaksanaankan aturan strategis akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian, kapasitas

pendukung yang disediakan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di MAN 3 Balangan telah berjalan dengan cukup baik. Pelaksanaan inisiatif ini didukung oleh tenaga pelaksana yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas dan jaringan sekolah yang mendukung kelancaran proses pembelajaran dan pencairan dana. Tenaga kerja di sekolah dinilai mampu memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik dengan baik, dan proses pencairan dana juga berjalan lancar berkat informasi yang disampaikan secara jelas melalui pemberitahuan resmi. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam hal jumlah kapasitas pendukung manusia yang terlibat. Jumlah personel yang terbatas tidak sebanding dengan beban tugas yang ada, sehingga efektivitas pengelolaan administrasi, pendataan penerima manfaat, serta pengawasan penggunaan dana belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan ini berpotensi menghambat pencapaian sasaran inisiatif secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga pelaksana agar pelaksanaan PIP dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan merata. Berdasarkan temuan ini, pelaksanaan Program Indonesia Pintar di MAN 3 Balangan telah sesuai dengan teori pelaksanaan aturan strategis Merilee S. Grindle dalam Sahya Anggara (2018: 255–257), khususnya dalam aspek isi aturan strategis dan konteks pelaksanaan yang menekankan pentingnya dukungan kapasitas pendukung dan lingkungan pendukung dalam menjalankan suatu aturan strategis secara efektif.

Konteks implementasi

Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor

Strategi, sumber, dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan aturan strategis yang di-pelaksanakannya. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pelaksanaan kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor dalam Program Indonesia Pintar (PIP) di MAN 3 Balangan berjalan masih menghadapi kendala. Penyaluran dukungan memang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah dan tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak sekolah, serta administrasi inisiatif tercatat secara rapi. Sekolah, melalui guru dan kepala madrasah, menjalankan peran sebagai pelaksana teknis yang menyalurkan dukungan sesuai ketentuan. Namun demikian, terdapat sejumlah kelemahan dalam aspek sosialisasi dan komunikasi. Sosialisasi mengenai inisiatif ini belum dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh pihak yang berkepentingan, baik peserta didik, wali murid, maupun pihak sekolah lainnya. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman tentang peran, kepentingan, serta strategi dari aktor-aktor yang terlibat, termasuk pengaruh sekolah dan pemerintah dalam proses pelaksanaan. Tidak adanya dokumentasi atau komunikasi formal yang menjelaskan peran masing-masing aktor turut memperburuk kondisi ini. Minimnya transparansi dan koordinasi antar pihak menyebabkan rendahnya partisipasi dan pemahaman bersama terhadap sasaran inisiatif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterbukaan informasi dan koordinasi yang lebih baik agar semua aktor dapat memahami dan mendukung pelaksanaan inisiatif secara efektif. Berdasarkan temuan ini, pelaksanaan PIP di MAN 3 Balangan belum mencerminkan prinsip pelaksanaan aturan strategis menurut teori Merilee S. Grindle dalam Sahya Anggara (2018: 255–257), khususnya dalam aspek isi aturan strategis dan konteks pelaksanaan yang seharusnya melibatkan interaksi antar aktor secara terbuka dan partisipatif.

Karakteristik lembaga dan penguasa

Implementasi suatu inisiatif dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik mengenai “siapa mendapatkan apa” (misalnya,

penggusuran pasar tradisional menjadi supermarket) dapat menjadi petunjuk tidak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implementor. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di MAN 3 Balangan dari aspek karakteristik lembaga dan penguasa masih berjalan masih menghadapi kendala. Lembaga pengelola PIP telah menunjukkan komitmen dalam menyalurkan dukungan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran, serta menerapkan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana. Namun dalam praktiknya, pengawasan masih belum optimal, dan pelaksanaan inisiatif belum sepenuhnya menjamin bahwa dana benar-benar digunakan sesuai kebutuhan pendidikan. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam hal sosialisasi dan penyampaian informasi secara menyeluruh kepada seluruh penerima manfaat. Beberapa peserta didik dan wali murid belum memahami secara utuh mekanisme, prosedur, serta sasaran inisiatif, sehingga berpotensi terjadi kesalahan pemanfaatan dana atau ketidaktepatan sasaran penerima. Meski demikian, karakteristik sekolah sebagai pelaksana teknis dinilai cukup mendukung, dengan adanya lingkungan belajar yang positif serta dukungan dari guru dan narasumber yang membantu peserta didik lebih fokus dan nyaman dalam menjalani proses pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat aspek positif dari karakteristik sekolah, masih diperlukan perbaikan dalam sistem komunikasi, pengawasan, dan pemahaman terhadap aturan strategis di tingkat lembaga pengelola. Berdasarkan temuan ini, pelaksanaan Program Indonesia Pintar di MAN 3 Balangan belum sepenuhnya sesuai dengan teori pelaksanaan aturan strategis Merilee S. Grindle dalam Sahya Anggara (2018: 255–257), khususnya pada aspek isi aturan strategis dan konteks pelaksanaan yang menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh, koordinasi antar lembaga, dan pengawasan yang konsisten.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Pada MAN 3 Balangan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di MAN 3 Balangan terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung merupakan unsur penting yang membantu kelancaran pelaksanaan inisiatif. Salah satunya adalah tersedianya sarana seperti komputer, laptop, dan jaringan internet yang mempermudah proses pendataan, pencairan, serta pelaporan dana. Sarana yang memadai dinilai sangat penting oleh pihak sekolah, peserta didik, maupun wali murid dalam mendukung pelaksanaan inisiatif secara efisien. Selain itu, sistem administrasi yang tertata juga menjadi faktor penting. Administrasi yang rapi memudahkan pengelolaan data peserta didik, mempercepat proses pencairan, dan mendukung akuntabilitas inisiatif. Penggunaan teknologi seperti aplikasi digital juga sangat membantu dalam mempercepat pendataan dan pelaporan serta mempermudah komunikasi antar petugas. Di samping itu, prasarana fisik seperti ruang kerja dan akses internet yang tersedia di sekolah turut menunjang kelancaran pelaksanaan inisiatif di lapangan. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas inisiatif. Salah satunya adalah kurangnya informasi dan komunikasi yang menyebabkan peserta didik serta wali murid belum memahami sepenuhnya alur pencairan dan sasaran inisiatif. Minimnya sosialisasi ini berdampak pada keterlambatan, kebingungan, dan potensi penyalahgunaan dukungan. Selain itu, keterbatasan kewenangan sekolah juga menjadi kendala serius. Sekolah hanya berperan sebagai pengusul tanpa wewenang menentukan penerima, sehingga inisiatif menjadi kurang fleksibel dan tidak selalu sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Kurangnya arahan dan sosialisasi yang menyeluruh turut menghambat efektivitas

pelaksanaan, karena masih banyak pihak yang belum memahami mekanisme inisiatif secara utuh. Terakhir, kendala juga muncul dari jumlah pengelola yang terbatas serta kurangnya pemahaman mendalam tentang inisiatif, yang membuat proses administrasi berjalan lambat dan distribusi informasi kurang maksimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pendukung manusia, kewenangan sekolah, serta komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan agar pelaksanaan PIP di MAN 3 Balangan dapat berjalan optimal, efisien, dan tepat sasaran.

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan di MAN 3 Balangan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di madrasah tersebut belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari berbagai indikator yang masih menghadapi kendala, seperti kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program, jenis manfaat yang dihasilkan, mekanisme pengambilan keputusan, kapasitas pelaksana, strategi serta kepentingan aktor yang terlibat, dan karakteristik lembaga pengelola. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi meliputi aspek pendukung, yakni tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sistem administrasi yang tertata, serta pemanfaatan teknologi, sementara faktor penghambat mencakup keterbatasan informasi dan komunikasi, minimnya kewenangan sekolah, kurangnya sosialisasi dan arahan, rendahnya partisipasi, serta belum meratanya pemahaman pengelola. Untuk memperbaiki pelaksanaan PIP di MAN 3 Balangan, Kementerian Agama disarankan memperkuat sosialisasi, pengawasan, dan koordinasi; kepala sekolah diharapkan meningkatkan koordinasi internal sekaligus menambah tenaga pelaksana; pengelola program perlu memperluas sosialisasi kepada guru; dewan guru diharapkan berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program; wali murid diimbau memahami tujuan dan sasaran PIP serta memanfaatkan dana sesuai peruntukan; sementara peserta didik penerima bantuan diharapkan menggunakan dukungan tersebut secara tepat guna memenuhi kebutuhan pendidikan mereka.

DAFTAR REFERENSI

1. Anggara, S. (2018). Kebijakan publik. Bandung: Pustaka Setia.
2. Anonim (2020) 'Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar'. Jakarta: Permenkumham.
3. Anonim (2025) 'Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam'. Jakarta: Kementerian Agama RI.
4. Fiantika, F.R. (2022) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Pertama. Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
5. Ismiyati (2024) 'Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Dilihat Dari Aspek Sumber Daya (Studi Kasus SD Negeri Wirang Kecamatan Haruai)'. Tabalong.
6. Marwiyah, S. (2022) *Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Probolinggo: Panca Marga.
7. Mohsen (2015) 'Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam'. Jakarta: Kementerian Agama.
8. Septiyani, A. (2023) 'Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang'. Sumedang.

9. Setiyadi, W.R. (2024) *Implementasi Kebijakan Publik*. Edisi Pertama. Jakarta Pusat: Moestopo Publishing.
10. Sitomarang, C.H. (2016) *Kebijakan Publik: Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Jawa Barat: Khalifah Mediatama.
11. Subianto, A. (2020) *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Edisi Pertama. Surabaya: Brilliant.
12. Sugiyono (2016) *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
13. Ulfiah, U. (2020) 'Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Kalua Kabupaten Tabalong'. Amuntai.
14. Usman, H. (2019) *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
15. Zamjani, I. (2020) *Biaya Satuan dan Lini Masa Pengelolaan Program Indonesia Pintar*. Edisi Pertama. Jakarta: Puslitjakdikbud